

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beras merupakan makanan pokok bagi lebih dari setengah populasi manusia di dunia, khususnya masyarakat miskin di daerah pedesaan dan pusat-pusat perkotaan pada negara-negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin (Nguyen, 2004 *dalam* FAO; 2004). Kedudukan beras yang sangat penting ini menempatkan beras menjadi komoditas strategis yang harus diperhatikan, terutama berkaitan dengan meningkatnya populasi manusia di dunia dan keterbatasan lahan pertanian. Berdasarkan data yang dihimpun oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) selama periode 2005/2006 sampai 2015/2016 laju pertumbuhan rata-rata pemanfaatan, produksi, produktivitas serta luas panen padi dunia yaitu 1,79% per tahun, 1,55% per tahun, 1,05% per tahun, dan 0,58% per tahun (Hermanto dkk., 2015). Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan rata-rata pemanfaatan beras dunia lebih besar dibandingkan dengan produksi, luas panen dan produktivitasnya. Apabila produksi padi tidak bisa ditingkatkan dan masih lebih rendah dari pemanfaatan, hal ini akan menjadi masalah serius.

Salah satu negara berkembang yang akan mengalami masalah serius adalah Negara Indonesia. Lebih dari 95 persen masyarakatnya mengonsumsi beras dan mengalami ketergantungan, meskipun masyarakat di beberapa wilayah mengonsumsi makanan pokok lain dan ada 77 jenis bahan pangan lain yang memiliki kandungan karbohidrat hampir sama atau lebih tinggi dari kandungan beras (Junaedi *et al.*, 2016). Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan diversifikasi pangan yang diimplementasikan dalam bentuk Pola Pangan Harapan (PPH) untuk mengurangi konsumsi beras dan meningkatkan perbaikan gizi namun, program ini tidak terlaksana dengan baik. Beras tetap menjadi pilihan utama dan bagian dari budaya yang tidak terpisahkan, bahkan sebagian besar masyarakat beranggapan belum makan jika belum mengonsumsi nasi. Hal ini mengakibatkan tingkat konsumsi beras perkapita mencapai 139 kg per tahun termasuk tertinggi di dunia dibandingkan dengan Jepang, Malaysia dan Thailand yang masing-masing hanya sekitar 45 kg, 80 kg dan 90 kg per kapita per tahun (Turmuktini *et al.*, 2012). Jumlah tersebut diproyeksikan terus meningkat karena

laju pertumbuhan rata-rata penduduk Indonesia selama periode 2010 sampai 2016 sebesar 1,36% per tahun (BPS, 2016).

Pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan beras nasional secara mandiri. Ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu 1) menurut Menteri Pertanian Suswono *dalam* Kompas (15 September 2014) konversi lahan setiap tahun cukup tinggi sebesar 110.000 ha, 2) degradasi air dan tanah meningkat mempengaruhi kualitas tanah dan menurunkan produktivitas, 3) berdasarkan data dari BPS tahun 2016 jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan sebanyak 1.8 juta orang, 4) sebagian besar penduduk yang bekerja di sektor pertanian sudah berusia lanjut atau *aging farmer* dengan taraf pendidikan relatif rendah dan sulit menerima inovasi teknologi, 5) infrastruktur dan fasilitas produksi padi terbatas, serta 6) perubahan iklim tidak bisa diprediksi. Kendala tersebut mengakibatkan produksi padi sulit ditingkatkan. Sementara itu, pangan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi dalam suatu negara sampai keperseorangan tanpa melanggar keyakinan agama masyarakat serta budaya bangsa. Hal tersebut tercantum dalam UU No.7 tahun 1996 tentang pangan dan dijamin dalam UUD 1945 pasal 27 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara berhak mendapat penghidupan layak seperti pangan yang cukup.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional adalah melakukan impor beras. Kebijakan impor dalam jangka panjang berbahaya karena menimbulkan ketergantungan, mengurangi devisa negara dan jika negara asal pengimpor gagal panen akan terjadi kelangkaan dan gejolak harga. Kondisi ini dapat mempengaruhi kestabilan nasional seperti yang terjadi pada tahun 1997/1998. Kenaikan harga beras yang tinggi memicu krisis ekonomi (Darwanto, 2011). Krisis tersebut kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi dan kerawanan pangan yang berimbas pada ketidakstabilan perekonomian, sosial dan politik secara nasional yang berakhir dengan runtuhnya pemerintahan yang sedang berkuasa saat itu.

Fenomena tahun 1997/1998 membuktikan bahwa ketersediaan beras sangat penting dan harus diperhatikan pemenuhannya. Sebelum peristiwa krisis multidimensi, Ir. Soekarno Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia pertama

mengemukakan bahwa persoalan pangan adalah soal hidup dan mati bangsa dan negara Republik Indonesia karena pangan merupakan kunci keberlangsungan hidup suatu bangsa. Dibutuhkan strategi khusus yang lebih terarah agar upaya peningkatan produksi efisien, efektif dan berkelanjutan. Harapannya upaya ini tidak hanya dilakukan pada lahan subur, mengingat keterbatasan lahan pertanian dan maraknya konversi lahan. Ekstensifikasi lahan (pembukaan lahan baru) tidak menyelesaikan masalah secara berkelanjutan karena peningkatan populasi tidak hanya membutuhkan pangan yang cukup, aman serta bergizi melainkan sandang dan papan. Solusi terbaik adalah intensifikasi lahan untuk meningkatkan produktivitas padi yang selanjutnya berdampak pada peningkatan produksi padi secara nasional.

Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang hampir sebagian besar wilayahnya terdiri dari lahan tadah hujan. Menurut data yang dihimpun oleh BPS, 2015 (*dalam* Kecamatan Grabagan dalam Angka, 2015) luas penggunaan tanah untuk lahan sawah sebesar 199 ha, ladang seluas 555 ha, pekarangan sebanyak 34,40 ha, hutan 185 ha, dan penggunaan lainnya hanya 2,10 ha. Tidak ada saluran irigasi, sumur pompa atau sumur bor di areal persawahan. Satu-satunya sumber air adalah air hujan sehingga petani hanya mampu memproduksi padi setahun sekali. Sawah tadah hujan sendiri umumnya tidak subur (miskin hara) sering mengalami kekeringan dan petaninya tidak memiliki modal yang cukup, agroekosistem ini disebut juga sebagai daerah miskin sumber daya (Toha dan Juanda, 1991 *dalam* Pirngadi dan Makarim; 2006).

Ironisnya pertanian merupakan mata pencaharian utama bagi 84,9 % atau 1.896 jiwa dari 2.233 jiwa angkatan kerja 10 tahun ke atas (BPS Kecamatan Grabagan dalam Angka, 2015) dan beras merupakan makanan pokok penduduk. Meninjau ketersediaan beras dunia, peran strategis beras bagi penduduk Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban dan pentingnya pertanian di daerah tersebut, maka intensifikasi lahan menjadi salah satu solusi tepat. Adanya intensifikasi lahan yang dapat meningkatkan produksi padi akan memberikan dampak positif bagi pendapatan petani. Bagi pemerintah, strategi peningkatan produksi dapat dijadikan sebagai upaya pengentasan kemiskinan masyarakat

pedesaan sekaligus menjalankan pembangunan pertanian seperti yang dianut oleh negara-negara berkembang lainnya.

Pemerintah sudah berupaya meningkatkan produksi padi di Desa Gesikan, Kecamatan Grabakan, Kabupaten Tuban melalui program Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT). PTT bukan merupakan paket teknologi, tetapi berupa pendekatan untuk meningkatkan produksi padi dengan cara mengelola tanaman, tanah, air, hara, dan organisme pengganggu tanaman (OPT) secara menyeluruh dan berkelanjutan yang penerapannya bersifat partisipatif, dinamis, spesifik lokasi, terpadu, dan sinergis antar komponen teknologi yang diterapkan (Deptan, 2016). Agar PTT dapat meningkatkan produksi padi secara berkelanjutan, pendekatan ini disertai dengan SL-PTT (Sekolah Lapang PTT). Salah satu komponen penting dalam PTT untuk meningkatkan produktivitas padi adalah introduksi dan penggunaan inovasi pola tanam Jajar Legowo.

Inovasi pola tanam Jajar Legowo sudah diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia dan terbukti mampu meningkatkan produktivitas padi. Widarto dan Yulianto (2001) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sistem tanam Jajar Legowo dua baris dengan jarak tanam 20 x 10 x 40 cm dapat meningkatkan produksi antara 560 – 1.550 kg/ha dibandingkan sistem tanam tegel dengan jarak tanam 20 x 20 cm dan R/C meningkat dari 1,16 menjadi 1,43, sedangkan peningkatan keuntungan sebesar Rp 1.352.000/ha. PTT berupa intensifikasi lahan untuk mengoptimalkan kemampuan produksi lahan melalui Jajar Legowo seharusnya tepat sasaran. Akan tetapi, adopsi inovasi pola tanam Jajar Legowo tidak berkelanjutan hanya diterapkan oleh empat orang dari 198 anggota Kelompok Tani Sumber Rejeki II (kelompok tani yang mendapatkan bantuan PTT Padi Jajar Legowo) Desa Gesikan Kecamatan Grabakan, Kabupaten Tuban dan bersifat sementara kemudian berhenti.

Mardikanto (1996) mendefinisikan adopsi inovasi merupakan suatu proses mental atau perubahan perilaku berupa pengetahuan (*cognitive*), sikap (*effective*) maupun keterampilan (*psyeomotor*) sejak mengenal inovasi sampai memutuskan untuk mengadopsinya. SL-PTT Padi Jajar Legowo sudah dijalankan dan diikuti oleh petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Sumber Rejeki II Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. Ada beberapa petani yang

berani mencoba, kemudian kembali ke sistem tanam tegel (tradisional) pada musim tanam berikutnya. Setelah lima tahun disosialisasikan, inovasi pola tanam Jajar Legowo cenderung ditinggalkan. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam adopsi inovasi pola tanam Jajar Legowo seperti yang diungkapkan oleh Mardikanto (1996) belum terwujud dengan baik.

Menurut pendapat POPT (Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman) yang bertugas di Kecamatan Grabagan, petani di daerah penelitian tidak mudah percaya (*trust*) dengan petugas lapang terkait maupun dengan sesama petani. Akibatnya, jaringan kerja sama tidak terbangun dengan baik dan kelembagaan pertanian hanya aktif ketika ada bantuan dari pemerintah. Pendapat lain diungkapkan oleh ketua UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Pertanian Kecamatan Grabagan, petani meninggalkan pola tanam ini karena jarak tanam yang harus diterapkan rumit, topografi sawah tadah hujan berbukit, luas lahan sempit, dan merubah budaya petani untuk meninggalkan sistem tanam tegel sangat sulit. Berdasarkan prespektif penulis, selama proses sosialisasi program tidak melibatkan kepercayaan dan asumsi dasar seperti nilai dan norma yang dianut masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi adopsi inovasi petani selain faktor karakteristik sosial ekonomi petani dan inovasi pola tanam Jajar Legowo melainkan keberadaan modal sosial.

Keberadaan modal sosial memiliki peran yang sama pentingnya dengan keberadaan modal ekonomi dalam proses pemberdayaan, namun masih sering diabaikan (Hadi, 2014). Terkait pentingnya modal sosial Solow, 1999 (*dalam* Cahyono; 2014) mengungkapkan bahwa serangkaian nilai-nilai dan norma-norma yang tercermin dari perilaku akan mendorong kemampuan dan kapabilitas masyarakat dalam bekerjasama dan berkoordinasi untuk menghasilkan kontribusi besar terhadap keberlanjutan produktivitas. Pendapat senada berasal dari Hasbullah (2006) yang menyatakan bahwa inti telaah modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu kelompok berkerja sama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada dan masih dianut oleh masyarakat akan menciptakan kepercayaan antar sesama melalui interaksi dalam bentuk kerja

sama. Melemahnya modal sosial akan mengakibatkan jaringan kerjasama tidak terbentuk dengan baik sehingga dapat meredupkan semangat gotong royong, memperparah kemiskinan dan menghalangi upaya dalam meningkatkan kesejahteraan. Berbagai penjelasan tersebut, mengindikasikan bahwa modal sosial memiliki peran yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat dan perkembangan adopsi inovasi.

Penelitian ini mengambil subjek anggota kelompok tani Sumber Rejeki II Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban yang sangat membutuhkan intensifikasi lahan untuk mengoptimalkan peluang peningkatan produksi padi pada lahan sawah tadah hujan dan peningkatan pendapatan petani pedesaan. Fokus penelitian ini hanya pada faktor-faktor penentu adopsi inovasi pola tanam Jajar Legowo, hubungan faktor penentu dan kendala atau permasalahan yang dihadapi petani dalam budidaya padi serta kendala yang dihadapi selama menjalankan adopsi inovasi pola tanam Jajar Legowo yang menyebabkan adopsi inovasi tidak berkelanjutan. Dengan demikian, pemahaman secara mendalam mengenai fenomena adopsi inovasi pola tanam Jajar Legowo yang tidak berkelanjutan di daerah penelitian diperoleh.

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat peran strategis komoditas beras dan meningkatnya kebutuhan beras seiring dengan tingginya pertumbuhan populasi dunia maka peningkatan produksi beras menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Menurut Maryani dkk. (2014) untuk mempercepat upaya peningkatan produksi padi nasional pemerintah bertekad menerapkan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional melalui pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) yang mampu meningkatkan produktivitas padi. Pada PTT ini digunakan inovasi pola tanam Jajar Legowo yang disertai dengan SL-PTT (Sekolah Lapang PTT). Pembinaan, bimbingan, pendampingan, dan pengawalan selama SL-PTT diharapkan mampu mewujudkan adopsi inovasi pola tanam Jajar Legowo sehingga pertumbuhan tanaman padi optimal dan hasil produksinya meningkat secara nasional. Dampak positif lainnya adalah pendapatan petani meningkat yang dalam jangka panjang dapat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan petani pedesaan.

Dilematisnya meskipun SL-PTT sudah dilaksanakan lima tahun yang lalu adopsi inovasi pada kelompok tani Sumber Rejeki II Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban (salah satu lokasi PTT Jajar Legowo) tidak berkelanjutan, hanya diterima sementara kemudian cenderung ditinggalkan sampai saat ini.

Menurut POPT (Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman) faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi petani adalah lemahnya kepercayaan baik antara petani dengan penyuluh maupun sesama petani. Rendahnya kepercayaan ini mengakibatkan jaringan kerjasama tidak terbangun dengan baik. Akibatnya kelembagaan pertanian hanya aktif ketika ada bantuan dari pemerintah. Sistem gotong royong mulai ditinggalkan dan digantikan dengan sistem upah. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat modal sosial bukan modal yang bisa dibeli atau diciptakan dengan mudah seperti modal uang dan sumber daya manusia. Modal sosial juga tidak mudah diperbaharui seperti modal sumber daya alam. Modal ini tercipta dari hasil interaksi dalam waktu yang cukup lama namun mudah sekali dirusak dan dihancurkan.

Keterlibatan modal sosial dalam penelitian memang bukan hal yang baru akan tetapi dalam perumusan kebijakan sering tidak dipertimbangkan. Modal fisik, alam dan manusia lebih sering dijadikan tumpuan dalam konsep pembangunan atau pemberdayaan. Padahal modal ini pasti dimiliki oleh setiap masyarakat meskipun tingkat kekuatannya berbeda tergantung jenis kelompoknya, tradisional atau modern seperti yang sudah dijelaskan oleh Hasbullah (2006). Mempertimbangkan dan melibatkan kondisi modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat sasaran program akan memberikan peluang keberhasilan program yang lebih tinggi. Selain itu, berkaitan dengan perubahan yang sangat cepat dan untuk menghindarkan terjadinya marjinalisasi petani, upaya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan modal sosial sangat diperlukan (Kusdarjito, 2012)

Peningkatan produksi hanya dipengaruhi oleh adopsi teknologi bukan peran penyuluh (Saridewi dan Siregar, 2010). Adopsi inovasi pola tanam Jajar Legowo pada kelompok tani Sumber Rejeki II Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban tidak berkelanjutan. Jika ditinjau dari ulasan tentang program PTT dan bukti nyata hasil produktivitas Jajar Legowo di beberapa

wilayah di Indonesia seharusnya upaya ini tepat sasaran. Berdasarkan fenomena adopsi inovasi tersebut mengindikasikan bahwa tidak semua petani menerapkan adopsi inovasi Jajar Legowo sedangkan petani yang sudah menerapkan pada musim tanam berikutnya kembali ke sistem tanam tegel (tradisional). Kondisi ini sesuai dengan pendapat dari Lionberger, 1968 (*dalam* Basuki; 2008) yang menyatakan bahwa umumnya individu tidak langsung menerapkan suatu praktik atau ide setelah mendengar informasi terkait. Suatu inovasi teknologi memerlukan waktu untuk dapat diterapkan oleh masyarakat secara meluas.

Senada dengan pendapat dari Lionberger (1968), Soekartawi (1988) menegaskan bahwa adopsi inovasi merupakan suatu proses berdasarkan dimensi waktu. Soekartawi juga menambahkan ada dua pertimbangan yang mempengaruhi petani dalam melakukan adopsi inovasi yaitu identitas calon adopter (rasa aman atau sebaliknya rasa khawatir, nilai-nilai sosial yang dimiliki, status sosial, derajat kosmopolitan, sikap mental, keterampilan melaksanakan adopsi inovasi, dan derajat *opinion leader*) dan persepsi situasi yang dimiliki (norma sistem sosial yang ada, kendala sosial-ekonomi yang dihadapi, dan karakteristik sumberdaya yang dimiliki). Kedua pertimbangan tersebut mengakibatkan waktu yang dibutuhkan setiap petani dalam mengambil keputusan adopsi inovasi berbeda. Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan pada bulan September tahun 2016 dengan narasumber ketua UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Pertanian Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban dan POPT (Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman) yang bertugas di daerah tersebut, perubahan perilaku petani lebih dipengaruhi oleh karakteristik inovasi bukan hanya identitas adopter atau persepsi kondisi yang dimiliki petani.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan adopsi inovasi pola tanam Jajar Legowo.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan karakteristik sosial ekonomi petani padi yang menentukan adopsi inovasi pola tanam Jajar Legowo
2. Mendeskripsikan karakteristik modal sosial yang menentukan adopsi inovasi pola tanam Jajar Legowo
3. Mendeskripsikan karakteristik inovasi pola tanam Jajar Legowo yang menentukan adopsi inovasi pola tanam Jajar Legowo
4. Mendeskripsikan hubungan karakteristik petani, inovasi dan modal sosial yang menentukan adopsi inovasi pola tanam Jajar Legowo
5. Mendeskripsikan kendala atau permasalahan yang dihadapi petani selama proses adopsi inovasi pola tanam Jajar Legowo

1.4 Kegunaan Penelitian

Bagi petani, penelitian ini dapat menjadi wadah aspirasi untuk menyampaikan pendapat tentang program dari pemerintah yang bersifat *top down* seperti introduksi teknologi pola tanam Jajar Legowo. Apakah program tersebut sesuai dengan kebutuhan petani dan kondisi lahan pertanian yang dimiliki serta mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam budidaya padi. Petani juga dapat menyampaikan saran dan harapannya terkait permasalahan yang mereka hadapi seperti sawah tadah hujan yang hanya bisa ditanami padi setahun sekali, meningkatnya degradasi lahan, terbatasnya ketersediaan air pada musim kemarau karena tidak ada sumur bor atau pompa air serta melimpahnya ketersediaan air pada musim hujan yang sering merusak tanaman padi dan pematang sawah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi wadah aspirasi tapi mampu menjembatani gap diantara petani dan pemerintah.

Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang sistem tanam Jajar Legowo dan pentingnya melakukan perubahan dalam budidaya padi yang sesuai dengan perkembangan lahan sawah saat ini. Kedua informasi tersebut sangat penting agar petani yakin dalam mengambil keputusan adopsi inovasi pola tanam Jajar Legowo sebagai upaya optimalisasi lahan sawah tadah hujan. Selain itu, untuk memanfaatkan peluang peningkatan produktivitas padi dan pendapatan petani.

Penelitian ini juga dapat memotivasi petani untuk lebih *open minded* dan percaya terhadap materi atau penyuluhan yang disampaikan PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) dan POPT (Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman) meskipun tidak diterapkan sepenuhnya dalam berbudidaya padi. Selain itu, memotivasi petani untuk memperkuat jaringan kerjasama dalam kegiatan usahatani dan menerima hal-hal baru (inovasi teknologi budidaya) tanpa menghilangkan norma atau kepercayaan yang dianut. Keterlibatan modal sosial dalam kegiatan usahatani akan memperkuat modal sosial itu sendiri dan memberi peluang keberhasilan program lebih tinggi.

Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberi gambaran atau potret nyata implementasi program introduksi pola tanam Jajar Legowo ditingkat petani. Hal ini berkaitan dengan keputusan Direktur Jenderal tanaman pangan selaku kuasa pengguna anggaran Direktorat Jenderal tanaman pangan nomor 18/KPA/SK.3101C/2/2016 tentang teknologi tanaman Jajar Legowo tahun 2016, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional dan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maka dibutuhkan upaya peningkatan produksi tanaman pangan melalui teknologi tanam Jajar Legowo. Keputusan tersebut menegaskan bahwa pemerintah akan menerapkan kembali teknologi Jajar Legowo. Melihat fenomena yang terjadi di daerah penelitian yaitu adopsi inovasi pola tanam Jajar Legowo yang tidak optimal dan cenderung ditinggalkan. Pemerintah harus mengkaji kembali apakah inovasi tersebut memang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lahan sawah yang dimiliki petani atau strategi komunikasi yang digunakan kurang tepat.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, pemerintah dapat memanfaatkan informasi yang disajikan dalam penelitian ini untuk merumuskan kebijakan baru yang lebih berpihak kepada petani. Informasi penting yang dapat menjadi dasar pertimbangan pemerintah meliputi 1) karakteristik petani yang berkaitan erat dengan perilaku petani dan cepat lambatnya adopsi inovasi, 2) karakteristik modal sosial yang memiliki peran cukup besar dalam adopsi inovasi namun, sering tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah padahal modal ini dapat menjadi tumpuan ketika modal fisik, sumber daya manusia dan materi terbatas, 3) karakteristik inovasi berhubungan dengan persepsi petani yang selanjutnya dapat

membentuk sikap dan mempengaruhi adopsi inovasi, 4) hubungan ketika faktor penentu adopsi inovasi yang menggambarkan peran setiap karakteristik dalam mempengaruhi adopsi inovasi, dan 5) kendala atau permasalahan yang dihadapi petani selama menjalankan adopsi inovasi pola tanam Jajar Legowo atau dalam budidaya padi yang mempengaruhi keputusan petani untuk menerima atau menolak inovasi. Informasi-informasi tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan atau memilih strategi komunikasi yang tepat agar program yang dicanangkan pemerintah terwujud.